

**Diskusi Pembelajaran Kaitan Antar
Isu Kemiskinan Ekstrim dan
Hak Asasi Manusia; Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya**

Jakarta, 26 April 2013



Website : www.ysik.org

E-mail : info@ysik.org

Daftar Isi

Judul	1
Daftar Isi	2
Latar Belakang	3
Tujuan	4
Waktu dan Tempat	4
Peserta	4
Fasilitator	5
Pencatat	5
Hasil Diskusi	5
Pengantar	5
IKA yang Bertransformasi	7
Catatan Penting Mengenai Dokumen Referensi	7
Kemiskinan Ekstrim	8
Gerakan dan IKA	10
Rekomendasi untuk IKA	13
Catatan tentang Komunitas Sekitar IKA	14

Latar Belakang

Saat ini isu kemiskinan dan hak asasi manusia adalah dua tema besar dalam pembangunan baik pada tataran lokal, nasional maupun global. Yang disayangkan adalah seringkali kedua isu ini dilihat secara parsial, dan banyak praktisi pembangunan yang memaknai kemiskinan sebatas pada standar pendapatan dan pertumbuhan ekonomi semata. Kegagalan dalam melihat keterkaitan antara dua isu ini membuat intervensi yang diambil belum mampu menjawab akar persoalan yang seringkali jauh lebih kompleks dari sekedar angka-angka statistik kesejahteraan.

Selain itu, isu gender yang diharapkan dapat menjadi mainstream, juga masih banyak salah dipahami sebagai persoalan ‘perempuan’ saja. Karena itulah hingga hari ini potret kemiskinan masih sangat identik dengan wajah perempuan di hampir seluruh belahan dunia. Merespon hal ini, Indonesia untuk Kemanusiaan (YSIK/IKA) merasa sangat perlu untuk mengkaji lebih jauh bagaimana keterkaitan antar isu dalam pembangunan dapat dipahami secara lebih baik agar IKA dapat terus memutakhirkan pendekatan kerjanya.

Dua dokumen yang menunjang untuk memahami perkembangan kaitan antara isu kemiskinan dan HAM adalah: (1) *Guiding Principles* tentang Kemiskinan Ekstrim dan Hak Asasi Manusia yang disampaikan oleh Pelapor Khusus Magdalena Sepúlveda Carmona pada tahun 2012; (2) Komentar Umum Nomor 20; Non-diskriminasi dalam hak ekonomi, sosial dan budaya (pasal 2, ayat 2, dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang disampaikan oleh Dewan Sosial Ekonomi PBB; Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di tahun 2009.

Dokumen pertama memberi pemahaman lebih dalam mengenai apa itu kemiskinan ekstrim, mengapa kemiskinan ekstrim dapat terjadi, mengapa pengentasan dan pemberantasan kemiskinan ekstrim menjadi penting bagi keberlangsungan suatu negara, bagaimana seluruh aspek negara memiliki kewajiban untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrim dan semuanya ini dibabarkan dalam bentuk sebuah *Guiding Principles* melalui pendekatan Hak Asasi Manusia sebagai alat untuk mengentaskan dan memberantas kemiskinan ekstrim bersama karena dikatakan isu ini adalah isu yang tidak tak terelakkan.

Sedangkan dokumen kedua memberikan pemaparan mengenai non-diskriminasi dan kesetaraan dalam kaitannya dengan berbagai macam hak-hak asasi manusia secara lebih khusus yang mencakup hak ekonomi, sosial dan budaya. Termasuk didalamnya adalah ruang lingkup kewajiban negara, arena larangan dalam diskriminasi, dan implementasi nasional secara lebih terinci.

Tujuan

Menyadari bahwa organisasi harus terus belajar untuk dapat memahami dan memberi makna secara tepat terhadap berbagai persoalan dan realitas yang begitu dinamis, maka Indonesia untuk Kemanusiaan melakukan diskusi terbatas yang bertujuan untuk:

- (1) Memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kaitan antara isu kemiskinan ekstrim dan hak asasi manusia.
- (2) Penguatan pemahaman bagi para calon peneliti yang akan mengembangkan instrumen riset untuk menemukan pembelajaran terbaik dari praktik-praktik pembangunan yang telah menggunakan pendekatan keterkaitan antar isu dalam kerja-kerjanya.

Waktu dan Tempat

Diskusi terbatas ini diadakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 26 April 2013
Waktu : 10.00 – 15.00 WIB
Tempat : Jl. Kemandoran I No. 97, Jakarta Selatan 12210
Telp. (021) 5483918

Peserta

Peserta diskusi terbatas berjumlah 14 orang yang terdiri dari internal IKA dan beberapa undangan khusus, yaitu:

1. Christina Dwi : Demos
2. Ingrid Silitonga : Demos

3. Endriani : Peneliti Independen dan Spesialis Gender
4. Osmar Tanjung : Praktisi pembangunan
5. Teresa Birks : Peneliti independen
6. Kamala Chandrakirana : Ketua *UN Working Group on the Issue of Discrimination against Women in Law and in Practice*
7. 8 staf pelaksana harian IKA yang terdiri dari:
 - a. Anik Wusari : Direktur Eksekutif
 - b. Ratna Fitriani : Direktur Program
 - c. Husna Mulya : Manager Program Galang Kebersamaan
 - d. Lina Wahyuningsari : Manager Keuangan
 - e. Marthin Sinaga : Staf Informasi & Dokumentasi
 - f. Jessica Lee : Asisten Program Bangun Keswadayaan
 - g. Sarjo : Staf Administrasi
 - h. Sohobi : Staf Umum

Fasilitator

Diskusi ini difasilitasi oleh Taty Krisnawati yang sebelumnya telah menerjemahkan dan membantu IKA dalam membuat bahan belajar dari kedua dokumen tersebut.

Pencatat

Hasil diskusi ini dicatat oleh Tasnim Yusuf.

Hasil Diskusi

Pengantar

Perubahan besar terjadi pada NGO dan CSO di Indonesia sejak resesi global pada awal tahun 2008 lalu. Sumberdaya dari lembaga donor internasional yang selama ini menjadi penggerak utama kegiatan NGO dan CSO berkurang drastis yang berdampak pada aktivitas dari lembaga-lembaga tersebut. Organisasi yang bertahan umumnya memiliki cadangan atau memiliki program-program yang menjawab persoalan kekinian.

Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan termasuk yang merespon perubahan tersebut dengan melakukan penyempurnaan struktur organisasi, penggantian pengurus pada tahun 2010 dan merubah nama menjadi Indonesia untuk Kemanusiaan. Nama Indonesia untuk Kemanusiaan lebih bernuansa gerakan sehingga para pendiri menggunakan kata yayasan sebagai strategi pada awal pendirian YSIK.

Perubahan nama IKA berimplikasi juga pada bentuk organisasi dari yang sebelumnya adalah organisasi grantmaking, sekarang menjadi organisasi sumberdaya. Salah satu fungsi IKA selain mengumpulkan dan menyebarkan sumberdaya juga membangun pengetahuan baru, membagi pengetahuan selain membagi dana, pengetahuan dan jejaring.

Diskusi mendalam tentang kemiskinan Ekstrim dan HAM Non-Diskriminatif dalam Hak Ekonomi Sosial ini diadakan untuk meningkatkan kapasitas staf IKA dan jaringan yang sedang bekerjasama dengan IKA. Perubahan yang terjadi menuntut internal untuk terus meningkatkan kapasitas dan terinformasi dengan situasi dan tren di luar organisasi. Meski demikian, IKA akan tetap menggunakan kekuatan perspektif Hak Asasi Manusia yang akan menjadi dasar gerak ketika berhubungan dengan pihak luar dan mewarnai program-program yang dilaksanakan. Salah satu program yang sedang berjalan yaitu program pengentasan kemiskinan yang bernama PNPM Peduli. PNPM Peduli merupakan program pemerintah untuk pemberdayaan yang khusus dikelola oleh organisasi masyarakat sipil. Lembaga-lembaga lain yang mengelola PNPM Peduli antaralain LAKPESDAM NU, Kemitraan, PKBI dan HCI. Keterlibatan IKA dalam program PNPM Peduli harus bermakna dengan menggunakan persepektif HAM sebagai landasan dalam setiap strategi yang dipilih. Hal lain yang menjadi latar belakang peningkatan kapasitas dalam IKA adalah staf yang baru bergabung sehingga perlu memperdalam pemahaman materi-materi terkait HAM dan kemiskinan.

Diskusi ini didokumentasikan sebagai bahan belajar yang tidak akan berhenti diinternal, tetapi akan disebarkan ke jaringan IKA dan publik lebih luas dalam bentuk publikasi website dan diskusi melalui forum-forum yang telah dan akan dibangun IKA.

Diskusi ini menggunakan dokumen terbaru PBB tentang kemiskinan ekstrim yang dikeluarkan pada tahun 2012. IKA telah menterjemahkan dokumen tersebut sebagai referensi untuk menjawab empat pertanyaan berikut :

1. Mengapa IKA perlu menterjemahkan dua dokumen ini?
2. Bagaimana dokumen ini dapat membantu IKA?
3. Bagaimana IKA melihat dokumen ini?
4. Produk turunan apa yang dapat dihasilkan dari dokumen ini?

Pendekatan IKA sebagai grantmaking sekarang jauh lebih mendalam dibanding sebelumnya. Sedangkan pendekatan sebagai lembaga sumberdaya, mengandalkan jejaring, sumberdaya dan relawan serta dana sebagai modal utamanya. Sehingga pengembangan kapasitas menjadi penting. Melalui pendekatannya, IKA berusaha melihat program kemiskinan bukan hanya terkait pada ekonomi tetapi juga dengan hak lainnya. Pada awalnya pendekatan ini belum dapat diterima, namun seiring waktu mulai dilihat juga oleh teman-teman lain termasuk PSF (PNPM Support Facilities) bahwa kemiskinan tidak cukup hanya dengan pendekatan ekonomi saja.

Perbedaan antara IKA dengan organisasi lain adalah IKA selalu menekankan perspektif HAM, dan memposisikan penerima manfaat sebagai orang yang harus didengarkan, harus diberdayakan dalam arti kata yang sesungguhnya. Salah satu contohnya IKA memberikan pelatihan advokasi yang berbeda dengan EO yang lain.

IKA yang Bertransformasi

Diskusi ini membahas kaitan IKA sebagai salah satu organisasi yang terus menerus bertransformasi dalam menemani kawan-kawan (organisasi dan komunitas) yang memiliki informasi dan akses jejaring terbatas akan dokumen PBB tentang kemiskinan ekstrim. Dokumen PBB sebagai jalan damai non perang sangat potensial dipakai sebagai panduan IKA melihat kemiskinan dan memilih pendekatan yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan.

Catatan penting mengenai dokumen referensi:

1. Kebijakan yang harus dipertanggungjawabkan kepada kelompok yang mengalami kemiskinan ekstrim. Apabila kelompok tersebut tidak memperoleh manfaatnya, mereka dapat menggugat kepada pemerintah.

2. Dokumen ini belum memuat indikator untuk memilah antara kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
3. Dokumen ini semacam *recharging* dalam mengembangkan dan memperkuat serikat yang memiliki basis seperti serikat petani, buruh dan serikat perempuan.
4. Dokumen ini menggunakan bahasa yang cenderung membosankan namun akan memberi kerangka yang utuh untuk kita dalam melakukan suatu langkah yang *rights base*.
5. Dokumen ini relatif baru (2012).
6. Dokumen ini bukan untuk menuntut pemerintah, justru untuk semakin membangun kapasitas dalam bekerja dengan kerangka yang utuh, tidak parsial dan tidak ad hoc, tidak di *define* oleh fakta yang ada di depan mata tetapi kita punya satu *framework* yang lebih komprehensif dan lengkap.
7. Untuk IKA, dokumen ini dapat memandu menemukan kawan-kawan yang sedang melakukan kerja di komunitas yang ada di garis depan, yang lebih inovatif dan yang melakukan *approach* yang komprehensif dan lebih maju dari sebelumnya.
8. Memberi kerangka berpikir sistematis dengan indikator kita sendiri dengan catatan-catatan yang lebih sistematis.
9. Dokumen ini dapat digunakan semua atau seadanya bahkan dapat digunakan sebagai anak tangga untuk mengembangkan sesuatu yang inovatif dan membebaskan kita dari kotak-kotak yang sudah usang.
10. Dokumen ini memiliki dimensi taktis dan praktis.
11. Dokumen ini menjadi dasar hukum tambahan bagi teman-teman jaringan IKA yang bekerja dalam tema kemiskinan.
12. Dokumen ini memberdayakan perempuan dan laki-laki

Kemiskinan Ekstrim

Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa definisi kemiskinan namun belum memiliki indikator yang jernih atas definisi tersebut. Klasifikasi kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah sebagai berikut: prasejahtera, prasejahtera I, prasejahtera II. Sedangkan bacaan lain mengenai

paradigma kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan cultural.

Kemiskinan absolut berada dibawah garis kemiskinan; yang menjadi pertanyaan, dimana ukuran garis kemiskinan? Kemiskinan relatif sudah diatas garis kemiskinan tetapi tidak diakui keberadaannya oleh masyarakat setempat. Sedangkan kemiskinan kultural tidak diterima oleh masyarakat setempat. Bagaimana dengan kemiskinan ekstrim? Kemiskinan ekstrim dapat dilihat dari banyak dimensi. Sebelum diimplementasikan, kemiskinan ekstrim itu perlu dipahami seperti apa, dan dibuat indikator serta pemaknaan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga pasti lebih cepat untuk sebuah gerakan. Bahasa yang digunakan bukan lagi sulit dan ada media untuk mengkomunikasikannya.

Kata kunci yang perlu dibahas dalam kemiskinan ekstrim adalah diskriminasi. Ini adalah persoalan sentral di Indonesia. Diskriminasi terjadi dari hari kehari dan jauh lebih sulit ditangani dibandingkan dengan kekerasan dan HAM. Diskriminasi terinternalisasi dalam institusi dan perilaku kita juga dan sering dianggap tunggal. Sementara cara pandang tunggal akan melahirkan jawaban tunggal pula. Padahal diskriminasi sering berlapis-lapis misalnya perempuan minoritas yang mengalami diskriminasi akibat agama yang dianutnya. Perempuan tersebut akan mengalami diskriminasi perempuan, agama, mungkin rasial dan seterusnya.

Hal yang penting mendapat perhatian ketika bertindak membangun strategi, apakah telah memperhatikan dan peka terhadap diskriminasi atau masih melakukan homogenisasi.

Kemiskinan ekstrim juga terkait dengan peran negara dan sektor privat sebagai penyebab kemiskinan. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan aktor. Kita harus menumbuhkan kesadaran supaya kita bukan salah satu pelaku dari penyebab kemiskinan. Contoh kemiskinan ekstrim adalah korban pelanggaran HAM berat. Mereka dikucilkan secara sosial sehingga kesulitan secara ekonomi akibat tidak bisa mengakses hak mereka dan selanjutnya diturunkan kepada anak-cucunya. Contoh lain kemiskinan ekstrim yang dialami oleh petani, membunuh pelan-pelan dengan ketiadaan keterampilan, sumberdaya dan kemudian sawah atau tanahnya dibeli dengan murah atas nama pembangunan.

Definisi menggunakan istilah IKA, kemiskinan ekstrim itu tidak hanya finansial, tetapi juga jejaring dan pengetahuan sehingga jati diri dan martabatnya hilang. Sedangkan definisi

kemiskinan ekstrim menurut dokumen ini, orang yang mengalami kemiskinan ekstrim hidup dalam lingkaran ketidakberdayaan, stigma, pengucilan, diskriminasi dan kekurangan materi yang semuanya saling memperkuat satu sama lain. Definisi ini mengunci bahwa ekstrim harus mempunyai semua unsur. Kemiskinan ekstrim harus memenuhi syarat ekonomi, sosial dan budaya.

Gerakan dan IKA

IKA menggunakan dokumen ini sebagai pendekatan dalam realitas gerakan yang ada. Dokumen ini adalah alat mencari gerakan di masyarakat yang mungkin masih tenggelam, masih kecil namun berpotensi. Di percaturan dunia atau pun nasional, orang yang tidak menginginkan gerakan ini muncul juga banyak sehingga kemiskinan ini terus berlangsung. Ada 3 pilar yang menjadi penentu dalam kemiskinan yaitu **perangkat** yang tersedia dari undang-undang pangan dan sebagainya, **aktor** yang sekarang ini berlaga di DPR sampai di kabupaten-kabupaten, dan **akar**, ideologi, cara hidup ini.

IKA seperti jembatan; inputnya sumberdaya yang kemudian dibagi-bagi. Dengan segala kompleksitas persoalan, kita ingin melihat bagaimana dokumen ini bisa membantu IKA menemukan teman-teman yang sedang bekerja di komunitas yang akan mendukung *framework* pemikiran ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah melakukan perubahan dan penanganan yang seperti apa, bentuk dukungan yang tepat untuk mereka dan bagaimana kita menemukan mereka?

Sosialisasi kerangka pemikiran berdasarkan dokumen ini dapat dilakukan melalui *website* IKA, *flyer* sederhana dengan bahasa populer yang mudah dimengerti serta diskusi-diskusi.

Upaya IKA dalam menemukan dan mendokumentasikan kelompok dan komunitas yang terus menerus melakukan perubahan terhimpun dalam hasil asesmen yang dilakukan dalam tahun ini. Kelompok Korban 65 di Palu yang diorganisir oleh teman-teman SKPHAM adalah contoh kelompok organik yang menggunakan prinsip-prinsip kemandirian untuk menjalankan organisasi. Kelompok ini bertahan dan cenderung menolak dukungan yang akan memperlemah perjuangan mereka. Organisasi ini bekerja dengan semangat volunterisme dan berhasil membuat walikota Palu mengeluarkan permintaan maaf resmi dan berkomitmen untuk tiga hal:

pertama, membantu keluarga korban, bagi generasi ke dua dan ketiga. Kedua, membantu mencari lapangan kerja karena ada peraturan melarang generasi kedua dan ketiga untuk menjadi PNS, militer dan kepolisian. Ketiga, menyediakan layanan kesehatan sebab anggota kelompok sudah sangat tua dan sakit-sakitan. Tugas selanjutnya adalah bagaimana kemudian menagih komitmen walikota ini? Karena itu baru komitmen, belum terealisasi. Kata kunci untuk kelompok ini adalah berpikir dan bersikap. Hal yang masih langka di republik ini.

Contoh lain adalah gerakan yang dibangun oleh Handoko di Batang. Gerakan yang mengkombinasikan buruh, nelayan, dan petani untuk bisa menyadari dan memahami hak mereka sebagai warga. Isu yang mengemuka dan mengikat gerakan ini adalah *land reform*; kepemilikan atas lahan. Handoko mengajarkan bahwa politik dan demokrasi itu bukan sesuatu yang sangat jauh melainkan sangat dekat dengan mereka. Kemudian Handoko mendorong sepuluh kader dari teman-teman yang bergabung dalam PNPB untuk ikut dalam pemilu kades. Enam dari kader tersebut bisa lolos tanpa menggunakan politik uang. Selanjutnya Handoko memperluas gerakannya melalui koperasi dan mendekati ruang politik yang lebih formal. Gerakan Handoko juga melibatkan perempuan dengan mendirikan Omah Perempuan. Untuk mendanai kegiatan, mereka melakukan *fundraising* dengan menabung dan memberdayakan aset anggota seperti menyediakan penginapan dan akomodasi untuk tamu-tamu organisasi yang ingin belajar di Batang. Dari penyediaan penginapan dan akomodasi, anggota dan organisasi memperoleh dana.

Kasus yang dikemukakan diatas merupakan nilai-nilai eksklusif yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Kekuasaan korban untuk bisa memilih dan bisa mencari cara mengatasi trauma-trauma yang mereka alami sehingga menjadi satu strategi bagi mereka. Kekuasaan akan menjadi praktek baik bagi komunitas tersebut dalam penyembuhan luka mereka sendiri. Selain itu perlu dicermati pendekatan yang digunakan oleh IKA sebagai orang luar. Apakah pendekatan yang digunakan dapat meningkatkan taraf *civil engagement* dalam level sosial, ekonomi, maupun kultural. Karena itulah yang nanti akan menentukan keberlanjutan dari gerakan sosial yang ada. Pembelajaran dari kelompok-kelompok diatas perlu diinventarisasi latar belakangnya sehingga mereka dapat bersikap dan bertindak benar. Faktor yang sangat kuat dimiliki oleh komunitas diatas adalah meredam fragmentasi dengan melakukan konsolidasi, kepemimpinan, dan

adanya kesadaran politik yang secara sadar dibangun. Praktek baik ini dapat diduplikasi ditempat lain dengan penyesuaian-penyesuaian yang mana para penyebar atau fasilitatornya adalah para pemimpin-pemimpin lokal tersebut. Mereka dapat saling bertukar pengalaman dengan saling berkunjung antar komunitas dan kelompok.

Keunggulan dari kelompok di Palu adalah mereka telah memiliki kesadaran politik dengan mengorganisir diri serta mampu memetakan actor dengan tepat. Masyarakat sosial itu sudah bertransformasi menjadi masyarakat politik sehingga praktek baik dapat disampaikan ke wilayah-wilayah yang memang memerlukan melalui perantaraan IKA.

Fasilitator dari pertemuan-pertemuan ditempat lain adalah *role model* yang telah memiliki praktek baik dan akan dikembangkan melalui jejaring. Kita dapat membangun jejaring nasional berdasarkan teritori, latar belakang, geografik dan seterusnya. Hal yang harus dicermati juga oleh IKA adalah soal peran dalam membangun sinergi diantara berbagai macam latar belakang organisasi, bukan hanya memperkuat dan hidup dalam kotak-kotak sendiri. Jangan sampai terjadi banyak organisasi mengerjakan hal sama dalam waktu sama padahal dengan berjejaring dan membangun satu satu *framework* bersama persoalan tersebut akan lebih cepat diatasi. Misalnya di Sulawesi Tengah, ada sekolah perempuan yang didirikan Kapal Perempuan dan apakah sekolah tersebut berjejaring dengan SKPHAM di Palu? Mereka mempelajari Gerwani dari buku teks dan apakah dapat mempelajari secara nyata pada komunitas yang didampingi SKPHAM?

Salah satu peran penting IKA adalah mempertemukan sebagai jejaring sumberdaya atau yang kita sebut *civil engagement*.

Gerakan itu bukan NGO yang saling bekerjasama, gerakan juga bisa dalam institusi negara, bisa di dalam institusi apapun bahkan individu. Jadi, gerakan itu sudah lewat dari batas-batas institusional. Ada bentuk institusionalnya tetapi bukan satu-satunya entitas, justru dia bergerak karena memang ada ide bersama yang bisa berjalan melalui berbagai jenis institusi yang arahnya sama. Inilah yang dinamakan sebagai gerakan sosial. Dan tidak ada yang memberikan komando karena itu sudah bagian dari kebersamaan.

Dalam membangun gerakan pentingnya bersinergi atau kerjasama dengan pemerintah. IKA bisa mempunyai peran yang sangat penting untuk menghubungkan antara komunitas dengan

pemerintah. Peran pemerintah dengan mempermudah gerakan akan menjamin keberlangsungan dari gerakan itu sendiri. Pemerintah yang dimaksud disemua level termasuk DPR, aparat penegak hukum dan pemerintah lokal.

Tantangan membangun gerakan seperti di Palu dan Batang adalah kepemimpinan, memberikan komitmen penuh tanpa ego ingin menjadi nomor satu, dan sulit memperoleh serta melakukan kaderisasi. CSO di tingkat *grassroot* sudah semakin sedikit., hampir tidak ada orang yang mau bekerja di gerakan. Dahulu, masih sangat mudah mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang mau bekerja untuk komunitas, bersedia *live-in* dan bekerja untuk kepentingan-kepentingan petani dan buruh dalam kurun satu hingga enam bulan. Sekarang ini, sangat sulit menemukan para mahasiswa yang bersedia sebagai relawan-relawan sekaligus belajar tentang gerakan.

Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan Demos, partai politik sudah masuk ke dalam kampus. Mereka menginvasi BEM-BEM karena termasuk potensial pemilih. Mereka diorganisir dengan menggunakan cara-cara politik praktis.

Contoh lain dari mitra IKA yang menarik adalah Sanggar Waria Remaja. Pendampingan dilakukan dari hal yang paling dasar seperti mengoperasikan komputer. 95% dari mereka bekerja sebagai pekerja seks walaupun itu bukan pilihan mereka. Pembelajaran yang diperoleh dari komunitas waria: program yang selama ini menyentuh mereka adalah program kuratif seperti pencegahan AIDs, komunitas yang paling rentan pun sebetulnya potensial untuk membangun gerakan, pemberdayaan membuat mereka berpikir soal pembebasan dan membangun kepercayaan diri, mereka belum berubah profesi tetapi sudah membuka jejaring, telah terjadi peningkatan kapasitas pada level individu dan terus berlanjut karena dalam proses hingga kini.

Rekomendasi untuk IKA

1. Merawat organisasi, komunitas yang mungkin mengalami kejenuhan dan kelelahan dengan menghadirkan hal yang baru sebagai inspirator untuk melahirkan praktek-praktek terbaik seperti yang telah dilakukan oleh SKPHAM di Palu dan gerakan yang dilakukan oleh Handoko di atas.

2. Menggunakan kerangka berpikir diskriminasi dan kemiskinan sebagai strategi pemberdayaan.
3. Menciptakan guru atau tempat belajar yang bisa membumi dengan menggunakan kerangka besar IKA.

Catatan tentang komunitas sekitar IKA

- Prakarsa Rakyat yang beranggotakan CSO dan komunitas yang diorganisir oleh Ayi Bunyamin. Anggota Prakarsa Rakyat mengemban tugas untuk menciptakan tokoh-tokoh komunitas di tingkat lokal yang akan membuat perubahan ditempat tinggalnya. Kader didorong untuk masuk kedalam sistem sebagai kepala desa, anggota DPRD dan kepala daerah. Gagasan ini hampir sama dengan yang dilakukan Demos dengan program BPD (Blok Politik Demokratik) salah satunya mendorong munculnya tokoh-tokoh pemimpin baru. Dua gagasan ini berjalan sendiri-sendiri dan akhirnya berhenti karena ketiadaan sumberdaya. Pengurus kedua organisasi pernah mengusulkan untuk menggabungkan kedua program tersebut namun tidak terlaksana hingga program berhenti.
- Komunitas AA dari Lumajang menggunakan pendekatan kultural dengan maulid hijau sebagai pendidikan alternatif untuk komunitas dan juga melawan perda-perda dan perspektif ekologis. Penggalangan dana melalui saweran yang merupakan budaya masyarakat setempat. AA melibatkan kelompok-kelompok diluar gerakan seperti geng motor untuk terlibat. Tujuan melibatkan kelompok tersebut untuk memperluas jangkauan gagasan maulid hijau.
- Tanoker Ledokombo Jember
Kelompok ini digagas oleh Farha Ciciek dan Suporaharjo yang pulang kembali ke desa untuk merawat orangtua. Tanoker artinya kepompong dalam bahasa Madura. Ledokombo merupakan desa miskin dan pimpinan di daerah itu sering berganti karena dianggap semacam daerah buangan. Jadi selama ini pemimpin Ledokombo adalah pejabat yang bermasalah. Ledokombo juga kampung buruh migran sehingga banyak anak-anak yang kemudian hanya tinggal bersama kakek neneknya dan membuat mereka hidup tanpa

bimbingan orangtua; diasuh oleh orang yang seharusnya justru dirawat, sehingga pendidikan menjadi hal yang memang tidak perlu. Ciciek kemudian melihat kondisi itu dan mereka membangun kelompok belajar anak-anak. Belajar bahasa Inggris dan musik melalui permainan tradisional enggrang. Guru-guru dan pembimbing berasal dari relawan dari mahasiswa perguruan tinggi dan kolega Farha Ciciek dan Supo.

Enggrang ini sudah nyaris punah namun berusaha dihidupkan kembali dan sebagai pintu masuknya dengan menyelenggarakan festival enggrang. Pada tahun pertama masih terkesan hanya sebagai festival budaya. Tetapi pada tahun-tahun berikutnya mereka bisa mentransformasi festival ini menjadi sesuatu yang menghidupkan denyut-denyut desa. Tamu datang dan menginap di rumah penduduk, dikenalkan kembali dengan kuliner lokal dan bahan makanan yang sulit didapatkan di tempat lain. Tamu-tamu menginap di rumah penduduk sehingga terjadi dialog yang mendalam.

- Sekolah Organik Karawang

Sekolah ini dimulai tahun 2007 oleh Taty Krisnawati dan Paul dengan menggunakan pintu masuk kesenian seperti gamelan, tari, dan lagu. Isu tentang pengetahuan mengenai pertanian dan sejarah masyarakat sehingga aktivitas sekolah tani digabung dengan pelajaran sekolah dan kegiatan-kegiatan yang membangun ruang untuk anak-anak sekitar mendapatkan tempat bermain; tempat berekspresi.

Guru yang mengajar harus bersama mau mencari dengan cara mau mengajak anak setempat belajar sambil berpetualang (*discovery learning*). Untuk mendapatkan orang-orang yang bisa mendampingi anak-anak itu prosesnya cukup lama.

Proses belajarnya selama empat bulan; selama satu musim tanam, anak-anak di pedesaan belajar tentang memilih benih yang baik, belajar menanam yang benar, mengamati pertumbuhan padi diselingi diskusi-diskusi dan belajar membuat laporan pertumbuhan padi. Proses belajar anak adalah mengamati, presentasi, tugas baca buku dan diskusi kelompok. Hal itulah yang menjadi elemen kunci untuk berpikir dan bersikap.

Sekolah ini juga bekerjasama dengan SMK Pertanian Garut dengan menyediakan tempat magang di sekolah Organik Karawang. Tantangan selama ini, anak-anak yang telah dididik

dan lulus kemudian bertebaran mencari pekerjaan non pertanian. Kenyataan ini awalnya menimbulkan kesedihan dan kekecewaan, namun sejak empat bulan terakhir, mimpi menciptakan petani telah dibuang. Menjadi apapun mereka nanti, petani, tentara, yang penting mereka belajar berpikir, menganalisa, bertanggungjawab, tahu koneksi satu sama lain. Alumni sekolah ini sekitar 80 orang yang sebagian berkerja di pabrik.

IKA sedang membuat riset kecil yang akan mendokumentasikan individu atau *interpersonality in practice*. Riset ini menghimpun segala ide-ide besar yang multiple discrimination. Dokumentasi kasus akan didokumentasikan dengan frameworks sehingga semua elemen dokumentasi mengapa ini dianggap *best practice* merujuk pada satu kerangka besar yang dirumuskan IKA. Dengan demikian IKA dapat menunjukkan wajah, bentuk dan karya yang akan didukung. Dokumentasi ini dapat digunakan juga sebagai panduan oleh organisasi lain jika ingin memperoleh dukungan sumberdaya dari IKA. Metode risetnya partisipatif dimana semua pihak terlibat.

Alat dokumentasi yang digunakan dalam bentuk video dengan durasi 5 hingga 10 menit yang akan mudah diakses oleh semua pihak. Dokumentasi tulisan juga tetap digunakan dengan tampilan dan bahasa yang mudah dipahami. Format video dapat diunduh dengan menggunakan telepon genggam yang sudah masuk ke desa-desa.